

**PERBEDAAN PROPORSI ANGGARAN PENDAPATAN  
PEMERINTAHAN DAERAH SEBELUM DAN SELAMA  
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH TAHUN 1999  
DI PROPINSI JAWA TIMUR**

**ABSTRAK**

Dengan pelaksanaan otonomi daerah yang secara langsung maupun tidak langsung mengimplementasikan sistem desentralisasi dalam bidang ekonomi maka dalam jangka panjang kebijakan pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi beserta dengan pengendaliannya akan memberikan suatu perbedaan dalam struktur anggaran yang akan disusun bila dibandingkan dengan sebelum adanya pelaksanaan otonomi daerah. Namun pada kenyataannya implementasi di lapangan berbeda dengan tujuan pemberlakuan UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah khususnya dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu penelitian ini berusaha meneliti perbedaan proporsi anggaran pendapatan pemerintahan daerah sebelum dan selama pelaksanaan otonomi daerah tahun 1999 pada Propinsi Jawa Timur.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi PAD terhadap total penerimaan pendapatan, proporsi pajak daerah terhadap total PAD dan proporsi retribusi daerah terhadap total PAD antara sebelum dan selama pelaksanaan UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan uji statistik beda dua rata-rata untuk observasi berpasangan dengan menggunakan data anggaran pemerintah daerah yang dikeluarkan pada tahun 1998-1999 dan data anggaran pemerintah daerah yang dikeluarkan pada tahun 2001-2002 dari 37 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur.

Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dari proporsi PAD terhadap total penerimaan pendapatan, proporsi pajak daerah terhadap total PAD dan proporsi retribusi daerah terhadap total PAD antara sebelum dan selama pelaksanaan UU no 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah, serta dengan pelaksanaan otonomi daerah yang secara langsung maupun tidak langsung mengimplementasikan sistem desentralisasi dalam bidang ekonomi maka dalam jangka panjang kebijakan pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi beserta dengan pengendaliannya akan memberikan suatu perbedaan dalam struktur anggaran yang akan disusun bila dibandingkan dengan sebelum adanya pelaksanaan otonomi daerah.

**THE DIFFERENCE OF REVENUE BUDGETING PROPORTION  
ON LOCAL GOVERNMENT BEFORE AND DURING  
LOCAL AUTONOMOUS IMPLEMENTATION (1999)  
IN EAST JAWA**

**ABSTRACT**

Local autonomous execution finally implement decentralize system in economics, so that on a long term local government policy to conducting efficiency and its control will give a difference in budget structure if compared before existence of local autonomous execution. But practically the implementation differ from the target of applying the 22<sup>nd</sup> and 25<sup>th</sup> regulations in 1999 about local autonomous regulation specially in economics. Therefore this research try to check the difference of revenue budgeting proportion on local government before and during autonomous execution of year 1999 in East Java.

Intention of this research is to know the difference of PAD proportion (local earnings proportion) to totalizing revenue, tax proportion to totalizing PAD and local retribution proportion to totalizing PAD before and during execution of the 22<sup>nd</sup> and 25<sup>th</sup> regulations in 1999 about local autonomous regulation. Research method used in this research is Paired-Samples T Test procedure compares the means of two variables for a single group. It computes the differences between values of the two variables by using data of local government budget released in the year 1998-1999 and data of local government budget released in the year 2001-2002 from 37 regency government in East Java.

Conclusion obtained in this research that there are signifikan difference PAD proportion to totalizing revenue, tax proportion to totalizing PAD and local retribution proportion to totalizing PAD before and during execution of the 22<sup>nd</sup> and 25<sup>th</sup> regulations in 1999 about local autonomous regulation, and finally the local autonomous execution make a long term local government policy more efficient and it will give a difference in budget structure when compared by before existence of local autonomous execution.